



Satgas Bongkar Dana Siluman Triliunan Rupiah

► Di Dinas Pendidikan, Kesehatan dan PU DKI
 ► Ahok Janji Dukung Satgas Antikorupsi

Anda ingin Mengomentari berita ini? Silakan like di Facebook Wartakotalive

Palmerah, Warta Kota

Satuan Tugas (Satgas) Antikorupsi yang dibentuk Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung (Kejagung) membidik "dana siluman" triliunan rupiah di Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan PU DKI Jakarta.

Dana siluman yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2014 ini antara lain mencapai Rp 3,54 triliun berasal di Dinas PU dan Dinas Kesehatan di Pemprov DKI.

Menurut data *Warta Kota*, Kepala BPKP DKI Bonny Anang Dwijanto akhir tahun lalu sempat mengemukakan bahwa dari jumlah itu, terbesar di Dinas PU sebanyak 286 kegiatan senilai Rp 3,5 triliun dan Dinas Kesehatan sebesar Rp 400 miliar.

"Anggaran ini telah kita konfirmasi ke SKPD terkait. Mereka mengaku tidak pernah menganggarkan kegiatan yang ditemukan itu. Hal ini juga pernah terjadi pada APBD 2013," ungkap Bonny kala itu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) murka saat menemui 'pengelembungan' anggaran dalam APBD 2014 program Dinas Pendidikan (Disdik) DKI. Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply) di setiap sekolah dan kantor kelurahan/kecamatan se-Jakarta Barat yang mencapai millaran rupiah.

"Yang pasti untuk pengadaan UPS mencapai Rp 330 miliar. Hanya sekolah. Makanya dia tender, dia (untuk) pintar menang Rp 5 miliar. Lebih murah dari Rp 6 miliar," ujar Ahok baru-baru ini.

Dana siluman

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Spontana di kantornya, Selasa (5/5) mengatakan, kasus dana siluman di APBD DKI 2014 ini akan dijadikan sebagai proyek uji coba. "Iya benar akan langsung diujicobakan ke kasus dugaan korupsi APBD DKI Jakarta," ujarnya.

Tony menjelaskan, peran kejaksaan lebih fokus pada penuntutan. Sementara penyelidikan dan penyidikan diserahkan sepenuhnya ke Polri dan KPK. Kebijakan strategi tersebut, lanjut Tony, demi penanganan perkara yang sinergis dan tak tumpang tindih sekaligus optimal dalam hasilnya.

"Karena di sana kan ada anggota polisi dan KPK juga punya jaksa. Sehingga, pada waktu penyelidikan dan penyidikan, tuntas dan bisa segera diterima penuntut umum di Kejagung," ujar Tony.

Dia menambahkan, saat ini Satgas Antikorupsi tersebut tengah merumuskan teknis kerja. Rencananya, Satgas akan mendiskusikan apakah akan membentuk lembaga baru atau hanya satuan gabungan. Yang pasti, kerja Satgas harus efektif dan sinergis.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)

Widyo Pramono menegaskan, tugas Satgas Antikorupsi mengatasi perkara korupsi yang sophisticated. Widyo menyebutkan beberapa kriteria kasus kemungkinan besar ditangani oleh Satgas. Namun hal tersebut baru sekedar wacana yang perlu direalisasikan sehingga dapat dirasakan manfaatnya.

"(Kasus korupsi) yang tingkat kerumitannya tinggi dan modus operandinya susah dilacak. Kemudian perlu kecepatan, perlu keroyokan menangani khusus perkara korupsi-korupsi tertentu, misalnya kepala daerah. Kepala daerah sekarang kalau nggak ada izin, nggak mau diperiksa. Dengan begitu, kejaksaan, Polri yang menganani begitu, soal perizinan sudah diserahkan ke KPK. Nah, KPK langsung lanjut," papar Widyo.

Padahal Kejagung sendiri telah memiliki Satgas untuk menangani perkara korupsi. Demikian juga KPK maupun Polri. Namun, Widyo meyakini bahwa tidak akan ada benturan dalam penanganan kasus korupsi dengan satgas gabungan tersebut.

"Penanganan perkara korupsi yang mewabah di Indonesia perlu satu gerakan yang lebih kompak, lebih bersatu, lebih kerja sama satu sama lain sehingga jika kita keroyok (bersama-sama) semakin sedikit kasus yang tak tertangani," kata Widyo.

Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki dan Johan Budi SP, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti serta Jaksa Agung HM Prasetyo menggelar pertemuan, Senin

(4/5). Pertemuan itu guna membentuk Satgas Antikorupsi.

Pembentukan Satgas ini didasari luasnya kewenangan KPK, Polri, dan Kejagung dalam menyelidiki perkara korupsi, tetapi kerap dibatasi oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang andal. Karena itu, Satgas diharapkan jadi kunci penyelesaian persoalan korupsi.

Dukung penuh

Menanggapi pembentukan Satgas Antikorupsi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok); mengaku mendukung penuh. "Bagus, dong. Kalo tiga (lembaga penegak hukum) yang ngelacak kan lebih bagus. Bagus lah semuanya akan dicari. Kita akan kasih data semua yang dibutuhkan oleh Satgas ini," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/5).

Bahkan, lanjut Ahok, pihaknya akan memberikan semua data yang diminta Satgas. Termasuk dengan penyidikan kasus APBD 2014 nantinya. "Nggak cuma APBD 2014 saja, data sampai APBD 2012 juga akan kita kasih," tegas Ahok.

Ahok juga mendukung jika nantinya SKPD diperiksa terkait kasus korupsi. Termasuk kedatangan Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso yang menangani kasus korupsi APBD 2014. "Beliau bilang kalau ada yang diperiksa jangan kaget (Bareskrim) datang gitu. Beliau juga tak ingin mengganggu kerjanya Pemprov. Kalau ternyata meluas kan yang terkena banyak orang.



Saya sih sudah bilang, saya siap-siap ganti, santai saja," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik juga menyatakan hal sama. Ia turut mendukung pembentukan Satgas tersebut.

"Wah pasti kami dukung. Karena itu kan untuk kepentingan bersama. Agar kasus korupsi bisa ditangani," kata Taufik.

Bahkan, ia juga siap jika diperiksa, termasuk anggota DPRD lainnya. "Jika perlu diperiksa, silakan saja. Kami pasti siap, agar terwujud kebenaran sejati," katanya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga tak mempermasalahkan pernyataan Alex Usman yang menyebut banyak anggota DPRD yang akan terseret kasus dugaan korupsi pengadaan UPS.

"Silakan saja buka-bukaan. Tapi analisa saya akan banyak pula pejabat SKPD yang ikut terseret kasus ini," kata Pras kepada *Kompas.com*, kemarin.

Seperti diberitakan, Alex Usman adalah mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Saat ini, mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS tahun 2014 ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Prasetyo sangat mendukung Paolri mengungkap kasus ini. Ia tidak pernah mempersulit Polri yang ingin memeriksa anggota DPRD.

"Sekarang lagi penyelidikan oleh Polri, silakan saja (jika mau memanggil anggota DPRD), yang penting sesuai tata krama dan mengikuti prosedur yang berlaku. Ada surat yang diantar ke DPRD," ujarnya. **(suf/Tribun)**

ANGGARAN SILUMAN DI APBD DKI 2014:

- Dinkes dan Dinas PU pada APBD 2014 mencapai 286 kegiatan dengan jumlah anggaran mencapai Rp3,54 triliun.
- Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan DKI Jakarta tahun anggaran (TA) 2014 dengan alokasi anggaran Rp 2,068 triliun dan realisasinya Rp 1,194 triliun.
- Program Pemprov DKI yang bermasalah itu adalah sejumlah proyek pengadaan barang, diantaranya proyek pengadaan UPS untuk sekolah menengah di DKI.
- Pengadaan alat scanner dan printer 3D, pengadaan Colaboration Active Classroom (CAC), dan pengadaan alat digital education classroom. Realisasi kegiatan yang diduga bermasalah (siluman) terdiri dari 454 paket kegiatan.
- Realisasi pengadaan UPS selama TA 2014 di Dinas dan Sudin Pendidikan DKI sebanyak 51 paket. Pengadaan itu di antaranya di SMP dan SMA sebanyak 49 paket dengan anggaran Rp 6 miliar/paket. Kemudian di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 1 paket dengan anggaran Rp 6 miliar/paket, serta di RSUD Cengkareng satu paket senilai Rp 1,37 miliar.

Sumber: BPKP dan Koordinator Divisi Monitoring dan Pelayanan Publik ICW, Firdaus Ilyas

Grafis: galih